

Kebakaran Besar Landa Kamp Pengungsi Rohingya di Bangladesh

DHAKA(AM) - Kebakaran besar melanda kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh pada Senin (22/3) sore. Kebakaran itu memusnahkan ratusan tenda dan sejumlah pusat kesehatan serta fasilitas lainnya.

Komisaris tambahan dari Komisi Pengungsi, Bantuan dan Pemulangan (RRRC) Mohamad Shamsud Douza mengatakan, kebakaran bermula di kamp Balukhali di distrik Cox's Bazar dan menyebar dengan cepat keempat blok lainnya. Sejauh ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan.

Juru bicara badan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR), Louise Donovan mengatakan, petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat serta tanggap bencana berada di tempat kejadian. Mereka mencoba mengendalikan kobaran api dan mencegahnya agar tidak menyebar lebih jauh. Donovan menambatkan, mitra kemanusiaan telah memobilisasi ratusan relawan dari kamp terdekat untuk mendukung upaya tersebut, termasuk mengerahkan kendaraan dan peralatan keselamatan kebakaran. "Kebakaran melanda tempat penampungan, puskesmas, titik distribusi, dan fasilitas lainnya. Relawan mendukung mereka yang terkena dampak," ujar Donovan.

Para saksi di kamp men-

gatakan, kobaran api mulai muncul sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Beberapa saksi mengatakan, mereka yakin kobaran api disebabkan oleh ledakan tabung gas minyak cair, meskipun hal ini belum dikonfirmasi.

"Penduduk setempat pertama kali mencoba memadamkan api sendiri. Tapi segera menyebar dengan cepat. Kami segera mencoba untuk mengevakuasi blok N8 di kamp tempat api mulai menyala," ujar pemimpin pengungsi Rohingya dari kamp Balukhali, Lalu Majhi kepada Aljazeera.

Menurut UNHCR, lebih dari 550 tempat penampungan di kamp Nayapara hancur akibat kebakaran. Selain itu 150 toko dan fasilitas milik organisasi nirlaba juga ikut terbakar. Pada Januari lalu, kamp pengungsi Rohingya di Cox's Bazar juga pernah terbakar sehingga ribuan orang kehilangan tempat berlindung.

Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah Bangladesh telah memindahkan beberapa ribu orang Rohingya ke pulau terpencil. Relokasi ini memicu protes dari kelompok hak asasi manusia yang mengatakan bahwa pemindahan tersebut dilakukan secara terpaksa. Selain itu, tempat relokasi bagi pengungsi Rohingya tidak aman. Tuduhan itu dibantah oleh pihak berwenang Bangladesh. ● tom



IDN/ANTARA

KEBAKARAN DI KAMP PENGUNGI ROHINGYA DI BANGLADESH

Asap mengepul ke udara di lokasi kamp pengungsi Rohingya saat terjadi kebakaran di Cox's Bazar, Bangladesh, Senin (22/3).

Kelompok Teroris Bantai 137 Orang di Niger

Kelompok teroris datang dengan sepeda motor dan membantai orang-orang di tiga desa di Niger. Pemerintah umumkan 3 hari berkebug nasional mulai Selasa kemarin.

NIAMEI(AM) - Kelompok teroris membantai 137 orang di Niger dalam sehari pada. Mereka datang sepeda motor dan menembak segala sesuatu yang bergerak.

Pemerintah setempat mengatakan pembantaian ratusan orang ini tercatat sebagai serangan paling mematikan yang pernah melanda Niger. Kekejaman kelompok teroris ini juga menggarisbawahi tantangan keamanan

besar yang dihadapi presiden baru Mohamed Bazoum.

Juru bicara pemerintah Zakaria Abdourahmane mengonfirmasi 137 orang tewas dalam serangan hari Minggu (21/3), di desa-desa dekat perbatasan Niger dengan Mali.

"Dalam memperlakukan penduduk sipil secara sistematis sebagai target sekarang, bandit bersenjata ini telah melangkah lebih jauh ke dalam

kengerian dan kebrutalan," kecam Abdourahmane dalam pernyataan yang dibacakan di stasiun televisi, seperti dikutip Gulf News, Selasa (23/3).

Pemerintah mengumumkan tiga hari berkebug nasional untuk para korban mulai Selasa. Pemerintah berjanji akan memperkuat keamanan di wilayah tersebut dan membawa para pelaku yang bertindak pengecut dan kriminal itu ke pengadilan.

Orang-orang bersenjata itu tiba dengan sepeda motor dan menyerang desa Intazayene, Bakorat dan Wistane. "Mereka menembaki segala sesuatu yang bergerak," kata seorang pejabat setempat.

Pembantaian mengerikan itu menambah jumlah korban jiwa di wilayah perbatasan

Mali-Niger menjadi 236 hanya dalam waktu seminggu.

Niger tercatat sebagai negara termiskin di dunia menurut peringkat pembangunan PBB untuk 189 negara. Negara itu juga berjuang dengan pemberontakan kelompok Islamis yang meluas dari Mali dan Nigeria.

Ratusan nyawa telah hilang, hampir setengah juta orang telah meninggalkan rumah mereka, dan kerusakan parah telah terjadi di negara bekas koloni Prancis itu.

Ketiga desa yang jadi lokasi pembantaian terletak di wilayah Tahoua yang gersang di Niger barat, berbatasan dengan wilayah Tillaberi di zona perbatasan yang terkenal dengan serangan ekstremis.

Pada 15 Maret, tersangka

"jihadis" membunuh 66 orang di wilayah Tillaberi, menyerang bus yang membawa pembeli dari pasar Banibangou, dan kemudian menggerebek desa Darey-Daye, membunuh penduduk dan membakar toko biji-bijian.

Pada hari yang sama, serangan yang diklaim oleh ISIS di apa yang disebut "daerah tiga perbatasan" di mana perbatasan Niger, Burkina Faso dan Mali bertemu menevaskan 33 tentara Mali.

"Setelah pembantaian Banibangou, kemarin para teroris, dengan cara barbar yang sama, menyerang penduduk sipil yang damai di Intazayene dan Bakorat," kata Bazoum dalam tweet pada hari Senin, yang menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada kerabat korban. ● tom

Warga Lebanon Protes Usai Pemerintahan Baru Gagal Dibentuk

BEIRUT(AM) - Para pengunjung rasa memblokir jalan-jalan utama di ibu kota Lebanon, Beirut pada Senin (22/3). Aksi unjuk rasa terjadi setelah pertemuan politik kembali gagal membawa hasil pada pembentukan pemerintahan baru.

Sekelompok anak muda memblokir jalan dan memblokir jalan menuju tujuan penting di berbagai bagian ibu kota, termasuk bandara. Unjuk rasa juga terjadi di tengah penurunan tajam pound Lebanon dengan nilai tukar turun 2.300 terhadap

dolar AS, membawa harganya menjadi sekitar 14.000 pound per 1 dolar AS di pasar gelap.

Pada pertengahan Maret, Aoun mengatakan bahwa Hari ini harus mengundurkan diri kecuali berhasil membentuk kabinet baru. Perdana menteri pun men-

gundang presiden untuk segera menandatangani kesepakatan tentang pembentukannya.

Sebagai tanggapan, Hari ini menawarkan untuk mengadakan pemilihan presiden lebih awal jika Aoun tidak menandatangani keputusan tentang pembentukan

pemerintahan. Menurut konstitusi Lebanon, persetujuan presiden penting karena tanpa persetujuannya itu tidak bisa disahkan. Namun, konstitusi juga tidak memberikan dasar apapun bagi pengunduran diri Hari ini. ● ans

Uni Eropa Terapkan Sanksi kepada Militer Myanmar

BRUSSELS(AM) - Uni Eropa (UE) memberlakukan sanksi terhadap 11 orang yang terkait kudeta militer bulan lalu di Myanmar. Sanksi itu diterapkan ketika penindasan terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi oleh pasukan keamanan mencapai tingkat yang "tak tertahankan".

Sanksi tersebut menandai tanggapan blok 27 negara itu sejak pengumuman pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Orang-orang yang menjadi sasaran sanksi termasuk Jenderal Min Aung Hlaing, panglima tertinggi militer Myanmar.

"Tiga orang tewas di kota kedua Myanmar, Mandalay, dalam kerusuhan baru pada Senin (22/3), termasuk seorang bocah lelaki berusia 15 tahun," papar saksi mata dan laporan media.

Para menteri luar negeri (menu) Uni Eropa mengadopsi larangan perjalanan dan pembekuan aset pada sejumlah jenderal itu pada pertemuan di Brussel. Sejauh ini, UE memiliki embargo senjata terhadap Myanmar dan telah mengeratkan beberapa pejabat militer senior sejak 2018.

"Kami akan mengambil sanksi terhadap 11 orang yang terlibat dalam kudeta dan penindasan para demonstran," papar Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell.

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan sebelum pertemuan bahwa, "Tindakan keras telah mencapai tingkat yang tak tertahankan, itulah sebabnya kami tidak akan dapat menghindari pemberian sanksi."

Di antara orang-orang yang menjadi sasaran adalah Min Aung Hlaing, Myint Swe, yang menjabat sebagai presiden sejak kudeta, dan staf militer dan pejabat senior lainnya. Tindakan yang lebih kuat diperkirakan segera diterapkan setelah UE bergerak untuk membidik bisnis yang dijalankan militer.

Para diplomat UE telah mengatakan kepada Reuters bahwa sebagian dari konglomerat militer, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corpora-

tion (MEC), kemungkinan besar akan menjadi sasaran, melarang para investor dan bank UE untuk berbisnis dengan mereka.

Para konglomerat tersebar di seluruh perekonomian mulai dari pertambangan dan manufaktur, makanan dan minuman hingga hotel, telekomunikasi dan perbankan. Misi pencari fakta PBB pada 2019 merekomendasikan sanksi terhadap dua perusahaan dan anak perusahaannya.

"Kami tidak bermaksud menghukum rakyat Myanmar tetapi mereka yang secara terang-terangan melanggar hak asasi manusia," papar Maas.

Sanksi baru mengikuti keputusan AS bulan lalu untuk mengeratkan militer dan kepentingan bisnisnya. Inggris bulan lalu membekukan aset dan melarang perjalanan tiga jenderal terkait kudeta tersebut.

Myanmar telah terkunci dalam krisis sejak kudeta, dengan pengunjuk rasa turun ke jalan setiap hari dan kampanye pembangkangan sipil terus berlangsung.

Junta mengatakan pemilu 8 November yang dimenangkan partai Suu Kyi adalah karena kecurangan. Tuduhan itu ditolak komisi pemilu nasional.

Para pemimpin militer menjanjikan pemilu baru tetapi belum menetapkan tanggal dan telah menyatakan keadaan darurat.

Suu Kyi, pemenang Nobel perdamaian berusia 75 tahun, dan tokoh-tokoh lain di Liga Nasional untuk Demokrasi ditahan di tahanan. Serangkaian tuduhan dilonarkan pada Suu Kyi, termasuk penyitaan. Pengacaranya mengatakan tuduhan itu dibuat-buat.

Dalam kekerasan terbaru, tiga orang tewas di Mandalay, menurut saksi mata dan portal berita Myanmar Now.

"Tun Tun Aung, 15 tahun, tewas di gubuknya ketika pasukan keamanan melepaskan tembakan di daerah kota Mya Yi Nandar," papar saudara perempuannya.

"Saudara saya duduk dekat jendela. Kami tinggal di tempat kecil. Rumah kami tidak cukup kuat menahan peluru-peluru," tutur dia. ● gul

Kudeta Militer Myanmar, Wartawan Akhirnya Dibebaskan

YANGON (AM) - Wartawan BBC Birma, Aung Thura, yang ditahan pihak berwenang di Myanmar sudah dibebaskan pada Senin (22/03), beberapa hari setelah ia ditangkap. Thura ditangkap oleh orang-orang tak berseragam pada 19 Maret saat melakukan tugas jurnalistik di luar gedung pengadilan di ibu kota Nay Pyi Taw. Sejak kudeta militer yang menggulingkan pemerintah sipil pada 1 Februari, setidaknya 40 wartawan ditahan. Penguasa militer juga telah mencabut izin lima perusahaan media.

Pada 19 Maret lalu, Thura ditangkap bersama seorang wartawan lain, Than Htike Aung, yang bekerja untuk media lokal Mizzima. Pada Maret ini, penguasa militer mencabut izin Mizzima.

Setelah ditangkap pada Jumat (19/03) siang waktu setempat oleh beberapa orang yang tak mengenalkan seragam, BBC tidak bisa menghubungi Thura. BBC membenarkan bahwa Thura dibebaskan pada hari Senin (22/03) namun tidak memberikan penjelasan lebih jauh.

Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan, setidaknya 149 tewas dalam berbagai aksi unjuk rasa warga, yang digelar untuk menentang kudeta militer. Namun banyak meyakini, angkanya mungkin jauh lebih tinggi.

Salah satu hari paling berdarah terjadi pada 14 Maret, yang menevaskan 38 orang. Pada hari penangkapan Thura, setidaknya

delapan orang dilaporkan meninggal dalam rangkaian protes di beberapa kota. "Kami sangat memperhatikan keselamatan semua staf di Myanmar dan kami akan melakukan apa pun untuk mecaat Aung Thura," ungkap BBC saat Thura tak diketahui keberadaannya.

"Kami menyerukan pemerintah untuk mencarinya dan memastikan bahwa dia selamat. Aung Thura adalah wartawan BBC yang berpengalaman dalam meliput peristiwa di Nay Pyi Taw," jelasnya.

Delapan orang yang meninggal Jumat (19/03) ditembak mati oleh aparat keamanan di kota Aungban, menurut media lokal dan pihak yang mengurus pemakaman.

"Pihak keamanan tiba dan memindahkan semua blokade namun warga bertahan, tapi mereka melepaskan tembakan," menurut seorang saksi kepada kantor berita Reuters. Laporan dari Yangon menyebutkan jalan-jalan padat karena banyak orang yang melarikan diri dari kekerasan.

Polisi juga dilaporkan memaksa demonstran mengesker barikade yang mereka dirikan. Kekerasan pasca kudeta sejauh ini menelan korban jiwa paling tidak 232 orang, menurut kelompok aktivis Assistance Association for Political Prisoners. Salah satu hari paling berdarah adalah tanggal 14 Maret.

Pekan lalu, militer Myanmar memperluas kondisi darurat di sejumlah tempat di seluruh negeri, menyusul hari paling

berdarah dalam aksi-aksi protes menentang kudeta pada awal Februari lalu. Sekitar 50 orang dilaporkan meninggal saat tentara dan polisi melepaskan tembakan ke arah pengunjuk rasa di berbagai daerah hari Minggu (14/03).

Sebagian besar korban meninggal berada di Yangon. Para pengunjung rasa menuntut dibebaskannya pemimpin sipil yang ditahan, Aung San Suu Kyi.

Pasukan keamanan melepaskan tembakan di sebuah kawasan di kota terbesar, Yangon, ke arah demonstran yang menggunakan tongkat dan pisau. Pihak militer mengumumkan keadaan darurat di kawasan tersebut setelah pabrik-pabrik China diserang. Para pengunjung rasa meyakini China mendukung militer Myanmar.

Gelombang unjuk rasa terus berlanjut sejak militer melakukan kudeta pada 1 Februari lalu. Dalam kemunculan pertama di publik, pimpinan sekelompok politisi yang digulingkan, Mahn Win Khaing Than mendesak para demonstran untuk membela diri dari penumpasan militer selama apa yang ia sebut sebagai "revolusi". "Dalam momentum tergelat negara ini dan momentum mendekati sang fajar," katanya, sambil menambahkan, "perlawanan harus menang."

Sedikitnya 21 orang dilaporkan tewas di Yangon pada Minggu kemarin. Kematian dan korban luka juga di kota-kota lainnya. ● tom



IDN/ANTARA

PERAWATAN PASIEN TERINFESI COVID-19 DI REPUBLIK Ceko

Petugas kesehatan memasuki sebuah ruangan untuk merawat tunawisma yang terinfeksi virus korona (COVID-19) di sebuah hotel, disewa oleh balai kota Praha bagi para tunawisma menjalani perawatan hingga sembuh, di Praha, Republik Ceko, Senin (22/3).

Putin: Hubungan Rusia-Uni Eropa tak Memuaskan

MOSKOW(AM) - Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan percakapan via telepon dengan Kepala Dewan Eropa Charles Michel pada Senin (22/3). Pada kesempatan itu, Putin menyatakan hubungan dengan Uni Eropa tidak memuaskan.

"Vladimir Putin memberikan penilaian tentang keadaan hubungan Rusia-Uni Eropa yang tidak memuaskan, garis telah berkembang karena garis mitra (Uni Eropa) yang tidak konstruktif dan terdapat konfrontatif," kata Kremlin dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Anadolu Agency.

Rusia menekankan ia siap memulihkan format interaksi normal yang dipolitisasi dengan Uni Eropa. Hal itu bakal

dilakukan jika ada kepentingan bersama yang nyata. Putin dan Michel juga membahas tentang penanganan pandemi virus corona. Hal itu termasuk kemungkinan menggunakan vaksin Sputnik V yang dikembangkan Rusia, penyelesaian politik konflik Ukraina, situasi di Belarusia, dan topik terkait lainnya.

Pada Februari 2014, pasukan Rusia memasuki Semenanjung Krimea, Ukraina. Sebulan berikutnya, Putin secara resmi membagi wilayah itu menjadi dua subjek federal Federasi Rusia yang terpisah. Turki, Amerika Serikat (AS), serta Majelis Umum PBB, memandang pencaplokan itu ilegal. Merespons hal tersebut, Uni Eropa pun menjatuhkan sanksi kepada Rusia. ● tom



IDN/ANTARA

UNJUK RASA AKTIVIS IKLIM DI SRILANKA

Seorang aktivis iklim memakai masker oksigen untuk menunjukkan kemungkinan memompa oksigen dari pohon di botol di masa depan, saat berunjuk rasa mengancam praktek penggundulan hutan oleh pemerintah di hutan satwa liar utama untuk pembangunan di Colombo, Sri Lanka, Senin (22/3).

Video dan Foto Aksi Seksual di Gedung Parlemen Australia Bocor, Seorang Staf Dipecat

CANBERRA(AM) - Skandal seks yang mengguncang pemerintah Australia semakin memburuk, setelah orang dalam perlemen membocorkan rekaman staf yang sedang melakukan aksi seksual di gedung parlemen. Video itu tampaknya direkam dan dibagikan di antara para staf sendiri.

Video itu diexpos oleh seorang pelapor dengan nama alias "Tom" kepada 10 News Australia pada Minggu (21/3). Pria tersebut memberikan kantor siaran tersebut apa yang dia klaim sebagai beberapa foto dan video dari staf senior pemerintah yang melakukan tindakan seks di tempat kerja mereka.

"Sekarang adalah waktunya untuk berbicara, sekarang adalah waktunya untuk mencatatnya. Ini adalah budaya pria yang berpikir bahwa mereka dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan," kata Tom kepada saluran tersebut. Dia menyerukan bahwa "klub pria yang buruk dan memiliki hak istimewa" itu untuk dihapus.

Gambar yang ditayangkan dalam video tersebut sangat kabur termasuk foto pria yang memperlihatkan alat kelaminnya dengan salinan buku peraturan Gedung Parlemen yang terlihat di latar belakang. Video lain menunjukkan seorang pria menunjuk ke meja seorang anggota parlemen Liberal perempuan dan kemudian melakukan aksi seks solo di atasnya. "Fakta bahwa itu adalah anggota parlemen perempuan hanya menambah aib," kata Tom.

Beberapa video, yang dilaporkan dengan difilkan dan diperlihatkan oleh para staf sendiri, dikatakan terlalu grafis untuk dipublikasikan bahkan dalam bentuk

yang kabur. Pelapor mengatakan dia telah menerima begitu banyak gambar eksplisit dari sesama staf sehingga dia akhirnya menjadi "kebal terhadapnya".

Ruang meditasi dan doa Gedung Parlemen adalah hot spot untuk seks di gedung, melihat "banyak" aksi menurut Tom, yang membenarkan bahwa dia juga menggunakan ruangan untuk tujuan itu. Si pelapor menyatakan bahwa baik pekerja seks laki-laki maupun perempuan telah dibawa ke gedung dalam beberapa kesempatan "untuk kesenangan anggota parlemen koalisi." "Saya mungkin dapat mengatakan bahwa sangat sedikit meditasi atau doa yang berlangsung di ruangan itu," ujarnya.

Diungkapkannya video-video itu memicu keagaduhan di antara pejabat tinggi Australia, dengan banyak yang menelepon untuk mengidentifikasi dan memecat para staf yang terlibat dalam video tersebut. Pengungkapan Tom telah memicu kekhawatiran di antara para pejabat tinggi Australia, dengan banyak yang menelepon untuk mengidentifikasi dan memecat staf yang gla seks, demikian diwartakan RT.

"Saya muak dan kaget... Ini menunjukkan pengabaian total untuk semua yang diperjuangkan oleh demokrasi parlementer kita," kata Menteri Keuangan Simon Birmingham tak lama setelah pengungkapan itu ditayangkan.

"Ini sama-sama menunjukkan penghinaan total, terus terang, bagi pembayar pajak Australia yang membayar gaji staf seperti itu. Menurut saya, setiap orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut harus bersiap-siap untuk berkemas dan meninggalkan gedung untuk selamanya," tambah menteri. ● tom